

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN
IBRAHIM KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**DWI ANNISYA RAKHMADANI
NIM : 15622053**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)
TANJUNGPINANG**

2021

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN
IBRAHIM KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

DWI ANNISYA RAKHMADANI

NIM : 15622053

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)
TANJUNGPINANG**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI ANNISYA RAKHMADANI
NIM : 15622053
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,08
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA
YAYASAN LUTHAN IBRAHIM KOTA
TANJUNGPINANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 18 January 2021
Penyusun,

DWI ANNISYA RAKHMADANI
NIM : 15622053

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN IBRAHIM
KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :

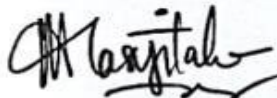
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

DWI ANNISYA RAKHMADANI
NIM : 15622053

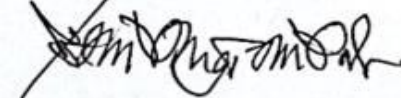
Menyetujui

Pembimbing Pertama



Masvifah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Bambang Sambodo S.E., M.AK
NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Mengetahui
Program Studi



Randy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

**SKRIPSI BERJUDUL
IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN IBRAHIM
KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan di susun oleh :

NAMA : DWI ANNISYA RAKHAMADANI

NIM : 15622053

Telah di pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada tanggal Delapan Belas
Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dan Dinyatakan Telah Memenuhi
Syarat Untuk Diterima
Panitia Komisi Ujian

Ketua



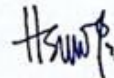
Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Sekretaris



Charly Marlinda, SE., M.Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

Anggota



Hasnarika, S.Pd., M.Si
NIDN. 1020118901 / Asisten Ahli

Tanjungpinang 18 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Charly Marlinda, SE., M.Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku.

Terima kasih karena selalu ada untukku.

MOTTO

Patience is needed when you want to achieve a success.

(Kesabaran sangat dibutuhkan saat anda ingin mencapai sebuah kesuksesan.)

~ Annymous ~

"Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

(Q. S Al-Tholag : 4)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"

(Q. S Al-Baqoroh: 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q. S Al-Insyiroh: 5)

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(Q. S Al-Mujadilah: 11)

"Man Jadda Wa Jada"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata I Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul “**IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN IBRAHIM KOTA TANJUNGPINANG**”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan ada kekurangan. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini, terutama pada :

1. Ibu CharlyMarlinda, SE.,M.Ak.Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PembangunanTanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Imran Ilyas, MM selaku wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Masyitah As Sahara, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Bambang Sambodo, S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, serta membantu memberikan masukan kepada penulis.
8. Pimpinan beserta staff Yayasan Luthan Ibrahim yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data skripsi.

9. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sangat membantu dalam perkuliahan.
10. Kepada orangtua Bapak Khairul S.Pd.SD dan Ibu Heppi Hayati S.Pd.SD, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta dukungan.
11. Teman-teman seperjuangan 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lasmi, Nuryana, Izhar, dan Dimas yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada adekku Nelvi Fadila dan Suci
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan. Dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tanjungpinang, 18 Januari
Penyusun

DWI ANNNISYA RAKHMADANI
NIM : 15622053

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori	
2.1.1 Akuntansi	11
2.1.2 Laporan Keuangan	12
2.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan	21
2.1.4 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba	21
2.1.5 Catatan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45	25
2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	25
2.1.7 Klasifikasi Aset dan Liabilitas	27
2.1.8 Pengertian Yayasan	28

2.1.9	Karakteristik Yayasan	29
2.1.10	Pendirian dan Pembubaran Yayasan	30
2.1.11	Permodalan Yayasan	32
2.1.12	Perpajakan Yayasan	34
2.1.13	Pola Pertanggungjawaban Yayasan	35
2.1.14	Struktur Organisasi Yayasan	36
2.1.15	Akuntansi Yayasan	36
2.2.	Kerangka Pemikiran	38
2.3.	Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1.	Jenis Penelitian.....	42
3.2.	Jenis Data	42
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4	Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1.	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Gambaran Umum Yayasan Luthan Ibrahim	45
4.1.2	Analisis Laporan Keuangan Laporan Keuangan pada Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang dan kesesuaian Menurut PSAK 45	46
4.2.	Pembahasan	51
BAB V PENUTUP		58
5.1.	Kesimpulan	58
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CURICULUM VITAE		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan
- Lampiran 2 Plagiarism
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PSAK NO. 45 PADA YAYASAN LUTHAN IBRAHIM KOTA TANJUNGPINANG

DWI ANNISYA RAKHMADANI. 15622053. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Yayasan Luthan Ibrahim dengan PSAK 45 tentang nirlaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, Data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa pedoman penyusunan laporan keuangan menurut PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dengan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang masih terlihat banyak perbedaan

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, pelaporan keuangan pada Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang hanya menyajikan Laporan Kas, Laporan Pengeluaran bulanan serta Laporan Kegiatan Pengurus Tahunan. Analisis yang didapat dari perbandingan antara pelaporan keuangan menurut PSAK 45 dengan pelaporan keuangan yang ada pada Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang adalah laporan yang dibuat belum sesuai dengan laporan yang seharusnya disajikan menurut PSAK 45

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK 45, Organisasi Nirlaba

Dosen Pembimbing 1 : Masyitah As Sahara, SE., M.Si

Dosen Pembimbing 2 : Bambang Sambodo, SE., M.Ak

A B S T R A C T

IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 45 ON YAYASAN LUTHAN IBRAHIM KOTA TANJUNGPINANG

DWI ANNISYA RAKHMADANI. 15622053. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

The purpose of this study was to determine the suitability of the Luthan Ibrahim Foundation's financial statements with PSAK 45 on non-profit. The research method used in this research is qualitative research methods.

In order to provide a clear, logical and accurate picture of the results of data collection, the data obtained are collected according to types and groups, then the data management and analysis is carried out in a descriptive qualitative way, namely raising the problem according to what it is. Qualitative data analysis is an effort made by working with data, organizing data and deciding what to share with others.

Based on the results of field research, it can be seen that from the above analysis, it can be seen that the guidelines for preparing financial reports according to PSAK 45 concerning Financial Reporting for Non-Profit Entities with financial reporting made by Luthan Ibrahim Tanjungpinang Foundation still show many differences.

Based on the data obtained by researchers, financial reporting at the Luthan Ibrahim Tanjungpinang Foundation only presents cash reports, monthly expenditure reports and annual management activity reports. The analysis obtained from the comparison between financial reporting according to PSAK 45 with financial reporting at the Luthan Ibrahim Tanjungpinang Foundation is that reports made are not in accordance with the reports that should be presented according to PSAK 45

Keywords : Financial Statements, PSAK 45, Non-Profit Organizations

Advisor 1 : Masyitah As Sahara, SE., M.Si

Advisor 2 : Bambang Sambodo, SE., M.Ak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari rasa empati manusia adalah dengan cara tolong menolong. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Terbentuknya organisasi nirlaba seperti yayasan merupakan wujud dari masyarakat dalam membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang tujuannya tidak menciptakan laba untuk kepentingan pribadi pengelola organisasi tersebut. Organisasi nirlaba dalam melaksanakan program-programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, oleh sebab itu pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Masing-masing organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang unik dan masih perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan standarisasi pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan juga akan disesuaikan dengan karakteristik organisasi namun tetap pada prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia Nickels & mchugh,(2010). Organisasi nirlaba meliputi, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, tempat ibadah serta organisasi peribadahan dan lain–lain (M.Syam, 2013).

Pada umumnya organisasi nirlaba dituntut untuk senantiasa menyiapkan rencana-rencana serta program dan penganggaran secara berkesinambungan. Rencana program serta rencana penganggaran ini diuntut untuk memiliki akuntabilitas serta transparansi yang memadai. Bendahara maupun staf keuangan organisasi nirlaba biasanya adalah seseorang yang mempunyai pengalaman dalam bidang akuntansi bisnis, tetapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam akuntansi sosial, sehingga pengelola organisasi nirlaba di sarankan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasari terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasinya. Sumber daya tersebut diperoleh dari pemberi sumber daya yang tidak terlalu mengharapkan pengembalian sumber daya tersebut atau dari beberapa usaha sampingan organisasi nirlaba tersebut.

Laporan keuangan Entitas Nirlaba bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, menyediakan seperangkat laporan keuangan lengkap yang meliputi posisi laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini dibutuhkan sebagai informasi akuntansi bagi para pengguna baik dari pihak eksternal, seperti donatur yayasan, kreditur yayasan, anggota organisasi dan pihak lainnya untuk mengambil keputusan (Mardiasmo, 2010).

Menurut Balkaoui dan lestari (2010) secara rinci tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai: jumlah dan sifat asset, liabilitas, aset neto entitas nirlaba, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto, jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar, sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya, cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan lainnya Ikatan Akuntansi Indonesia, (2018). Laporan keuangan meliputi posisi laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk satu periode, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan PSAK No. 45, dapat membuat penyajian laporan keuangan di organisasi nirlaba menjadi seragam. Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK No. 45 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi para pengguna (*users*) sehingga para pengguna ini dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur.

Pada kenyataannya masih banyak organisasi nirlaba yang masih belum menggunakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai masih sangat sederhana, dimana organisasi tersebut tidak membuat laporan keuangan yang lengkap yang seharusnya digunakan pada organisasi sektor publik umumnya yang telah menerapkan pedoman PSAK No. 45.

Witari (2015) dengan judul Penelitian “Pengaruh PSAK 45 terhadap kinerja Yayasan (studi kasus SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung)” Dimana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Yayasan masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan dari aset yang ada disekolah, sehingga memudahkan bagi para pelaku untuk mengambil aset yang terdapat disekolah tersebut. Kemudian keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menilai dan mencatat harga perolehan aset tetap sehingga sering sekali terjadi kerugian dalam hal menilai aset tetap tersebut. Selanjutnya karena kurangnya kesadaran pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan serta lemahnya pengendalian manajemen dalam mengelola aset yayasan yang seharusnya dapat menjadikan yayasan berkembang dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Norita (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember mengemukakan bahwa dalam hal pengungkapan yayasan panti asuhan belum membuat catatan atas laporan keuangan dan untuk penyajian laporan keuangannya Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim membuat dua laporan keuangan yaitu neraca sederhana dan laporan sumber dan pendayagunaan dana. Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim sudah memenuhi peraturan perundang-undangan zakat untuk membuat laporan keuangan. Namun komponen laporan keuangan yang dibuat belum lengkap dan belum memenuhi komponen laporan keuangan menurut PSAK 45, karena keterbatasan dana yang dikelola dan SDM.

Cenli (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK NO. 45 Pada Gereja BZL menyimpulkan bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan 3 penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 45 karena untuk penyusunan laporan keuangan telah diatur tersendiri dalam Tata Dasar dan Peraturan Gereja. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada Gereja Bukit Zaitun telah tercapai, walaupun masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.

Tinungki (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK NO. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha hana dengan kesimpulan bahwa Panti Sosial Tresna Werdha Hana sudah menyajikan laporan keuangannya namun belum menerapkan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan format PSAK No.45. Panti Sosial Tresna Werdha Hana hanya menyajikan format laporan keuangan sesuai dengan pemahaman mereka, karena kurangnya pemahaman tentang pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45. Walaupun belum menerapkan laporan keuangan yang ditetapkan oleh IAI, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana dapat berjalan dengan baik.

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa banyak organisasi nirlaba yang tidak menggunakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai

dengan PSAK 45 disebabkan oleh kurangnya kesadaran pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan, lemahnya pengendalian manajemen dalam mengelola asset yayasan, dan kurangnya pengetahuan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45.

Yayasan merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik yang tidak mencari keuntungan atau laba pada setiap kegiatan organisasinya. Menurut UU No. 16 tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha (Bastian indra, 2011).

Perkembangan yayasan di Indonesia cukup cepat tercatat ada ratusan yayasan yang berdiri di Indonesia namun hingga akhir tahun 2013 hanya terdapat 366 yayasan di Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai yayasan yang berbadan hukum dan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Sana Sholihah (2014), Sama halnya seperti organisasi nirlaba pada umumnya yayasan juga memiliki dana penerimaan dan pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan nirlaba pun telah diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan agar terdapat keseragaman, maka dari itu Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Yayasan Luthan Ibrahim adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan non formal untuk anak-anak SD, SMP dan SMA dan yayasan sosial menyalurkan infak atau pun sedekah pada masjid dan panti asuhan serta bantuan bencana alam. Pada tahun 2016 yayasan Luthan Ibrahim memulai kegiatan Yayasan. Sumber dana Yayasan Luthan Ibrahim terdiri dari sumber dana terikat (sumber dana donator tetap) dan sumber dana tidak terikat atau sumbangan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Laporan keuangan Yayasan Luthan Ibrahim hanya memiliki laporan keuangan yang seadanya saja berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan pemasukan dana, arus kas.

Sebagai lembaga nirlaba Yayasan Luthan Ibrahim harus melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan. Oleh karena itu yayasan Luthan Ibrahim wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tentunya sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia yaitu diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam proses pencatatan Yayasan Luthan Ibrahim dilakukan dengan baik oleh Yayasan di sebabkan oleh beberapa factor seperti kurangnya informasi terhadap pencatatan dengan judul “ Implementasi PSAK No. 45 Pada Yayasan Luthan Ibrahim kota Tanjungpinang “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana perlakuan akuntansi Nirlaba pada Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang ?
- 2) Apakah laporan keuangan Yayasan Luthan Ibrahim sesuai dengan PSAK No.45 ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya mencakup laporan keuangan tahun 2019 di Yayasan Luthan Ibrahim pada bidang sosialnya karena di tahun sebelumnya laporan keuangan yang di miliki oleh yayasan Luthan Ibrahim hanya memiliki laporan pemasukan dan pengeluaran, sementara di tahun 2019 laporan keuangan Yayasan Luthan Ibrahim terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi nirlaba pada Yayasan Luthan Ibrahim.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Yayasan Luthan Ibrahim dengan PSAK 45 tentang nirlaba.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menganalisa bagaimana perlakuan akuntansi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian berikutnya yang membahas masalah yang sama.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pikiran sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya atau pihak-pihak yang berminat dengan masalah Yayasan Nirlaba dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45 Nirlaba .

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai "Implementasi PSAK 45 Yayasan Luthan Ibrahim Tanjungpinang, terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, perumusan masalah, pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang topic penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang berisikan penelitian dan definisi operasional, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data yang telah diperoleh dari observasi di lapangan dan membahas mengenai pertanyaan di rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian kemudian dilanjutkan dengan saran dari peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi

Menurut (Hery, S.E., 2014) Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi.

Akuntansi (*accounting*) berbeda dengan pembukuan (*book keeping*). Pembukuan hanya meliputi seluruh proses pelaporan, mulai dari pengidentifikasi transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian (dalam bentuk laporan), sampai pada tahapan analisis dan interpretasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pembukuan (pencatatan) merupakan bagian dari seluruh proses akuntansi (pelaporan). (Hery, S.E., 2014)

Menurut Suwarjono (2002), akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu eksakta, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan. (RahmanPutra, 2014)

Menurut (Deddi Nordiawan; Iswahyudi Sondi Putra; Maulidah Rahmawati, 2012) menyatakan akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Berdasarkan dari pemaparan teori diatas dapat diketahui bahwa tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebanyakan sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi, baik untuk pelaporan internal maupun eksternal. Perusahaan pertama kali harus dapat mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan oleh para users. Setelah kebutuhan informasi teridentifikasi dengan baik, langkah selanjutnya adalah mulai merancang sistem akuntansi. Akhirnya, sistem akuntansi tadi akan mencatat seluruh data yang menyangkut aktivitas perusahaan. Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, laporan dapat disiapkan untuk kepentingan users.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bisa menjelaskan kondisi keuangan perusahaan, dan informasi tersebut juga bisa dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2015).

Menurut (Kasmir, 2014), pengertian laporan keuangan adalah: Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut (Anantawikrama Tungga Atmadja, & NI KADEK SINARWATI, 2014a), pengertian laporan keuangan adalah: Suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan adalah catatan keuangan mengenai aktivitas perusahaan atau organisasi selama kurun waktu tertentu (satu periode akuntansi/satu tahun yang memperlihatkan kondisi pada kurun waktu tersebut dan dipergunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang mengenai material dan krusial, yaitu uang, pasti dan harus dicatat dalam bentuk laporan keuangan (Ryan ariefiansyah & Miyosi Margi Utami, 2012).

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen kepada pemakai tentang pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Pemakai akan membaca laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban. Tentu saja laporan keuangan sebagai sebuah pertanggungjawaban harus dapat dipahami dengan baik bagi para pemakai.

Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan antar perusahaan akan semakin meningkat apabila laporan keuangan disajikan dalam format yang

seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos yang sejenis. Namun demikian dalam kenyataannya keseragaman tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Esensi dari penyajian laporan keuangan adalah arus pertanggungjawaban dimana ada pihak yang membuat pertanggungjawaban dan ada pula pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini memberikan salah satu implikasi bahwa antara yang membuat pertanggungjawaban dengan yang menerima laporan pertanggungjawaban harus terpisah. Demikian juga dalam penyajiannya, kedua belah pihak yakni pembuat dan pembaca harus mengacu pada satu standar, sehingga laporan keuangan sebagai media komunikasi dapat efektif.

Agar laporan keuangan memenuhi syarat yang telah dijelaskan di atas, maka perlu adanya standar akuntansi yang harus dipedomani dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.

Tujuan standar akuntansi keuangan adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Standar Akuntansi terkait.

Laporan keuangan untuk tujuan umum memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

1. Aktiva;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan dan beban; dan
5. Arus kas. (Drs. Hadri Mulya, 2013)

Dalam hal ini, pelaporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan Selama periode. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar deviden. (Hery, S.E., 2013)

Disisi lain Farid dan Siswanto mengatakan “laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”. Lebih lanjut Munawir mengatakan “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” dengan begitu laporan keuangan

diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. (Irham Fahmi, S.E., 2015).

Berdasarkan dari pemaparan teori diatas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan ada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dari beberapa penjabaran pada pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang tertulis dan memberikan sebuah informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat periode tertentu.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Indonesia, 2012): Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli , maka dapat ditarik kesimpulan laporan keuangan adalah informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yakni memberikan informasi untuk pihak yang memerlukan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk angka (Fahmi, 2015).

Menurut (Wantah, 2015), tujuan utama dari laporan keuangan adalah: Memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut (Kasmir, 2014), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut (Ryan ariefiansyah & Miyosi Margi Utami, 2012), Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal erat kaitannya dengan pengambilan keputusan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan laporan keuangan adalah:

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan

datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.1.2 Unsur Laporan keuangan

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Dapat dipahami, laporan keuangan disajikan dengan cara mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.
2. Relevan, maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.
3. Keandalan/Realibilitas, informasi yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap.

4. Dapat dibandingkan/komparabilitas, penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antarperiode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
5. Netral, Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.
6. Tepat waktu, laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkannya informasi tersebut.
7. Lengkap, informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. (RahmanPutra, 2014)

Dari pemaparan unsur tersebut diatas dapat diketahui laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam suatu entitas. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif memerlukan proses subklasifikasi lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Adapun yang kita lakukan pasti memiliki pedoman, begitupun dengan akuntansi. Dimana alam perlakuan akuntansi yang didasari pada aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini tercermin dalam pernyataan Standar Akuntansi Indonesia atau PSAK yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, penyajian laporan keuangan, standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik Ikatan Akuntansi indonesia (2018)

Adapun definisi Standar Akuntansi keuangan menurut Mulya (2013) merupakan aturan yang mengukur tentang perlakuan akuntansi yang dituangkan dalam sebuah standar yang di sebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sedangkan menurut Bahri (2016) bahwa standar akuntansi keuangan adalah untuk mengatur bagaimana peristiwa ekonomi dilaporkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi keuangan sebuah pedoman yang mengatur peristiwa akuntansi dan pencatatan, penyusunan, perlakuan, penyajian laporan keuangan yang dituangkan dalam sebuah standart .

2.1.4 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Menurut Hans kartahadi (2016) laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dikelola oleh suatu

entitas dengan tujuan untuk memberikan informasi atas posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Sedangkan menurut Muhammad (2011) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas.

Di dalam PSAK 45 Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali baik itu untuk anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari : laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

Berikut adalah unsur-unsur laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45 IAI (2018)

1. Laporan Posisi Keuangan.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu penyumbang, anggota, organisasi, dan pihak-pihak lainnya untuk menilai sebagai berikut:

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.

- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Dalam laporan posisi keuangan entitas nirlaba terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena berbeda dengan entitas bisnis. Di dalam laporan posisi keuangan entitas nirlaba secara keseluruhan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

2. Laporan Aktivitas.

Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu donatur, anggota, kreditur dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dalam memberikan jasa, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lainnya, atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan merugikan dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktifitas.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dalam entitas nirlaba menurut PSAK 45 bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009) Laporan arus kas atau SAK ETAP bab 7 dengan tambahan sebagai berikut:

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang, penerimaan kas dari sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang, Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45

Dalam PSAK 45 secara rinci tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset netto entitas nirlaba
2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset netto.

Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.

2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai IAI (2018) :

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci tujuan laporan keuangan termasuk Catatan atas Laporan

Keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset neto suatu organisasi.
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto.
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
- d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.

Laporan keuangan organisasi nirlaba hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

1. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
3. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari

kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.

4. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
5. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
6. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

2.1.7 Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan, mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti

1. kas dan setara kas.
2. Piutang anggota, dan penerima jasa yang lain persediaan.

3. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka.
4. Instrumen keuangan dan informasi jangka panjang.
5. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.

2.1.8 Pengertian Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang disahkan tanggal 6 Oktober 2004. Pengertian Yayasan Menurut Para Ahli

1. Pengertian Yayasan Menurut Subekti

Menurut Subekti, bahwa pengertian yayasan adalah badan hukum yang berada dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Subekti (2017).

2. Pengertian Yayasan Menurut UUY Pasal 1 No. 1

Sedangkan menurut UUY dalam Pasal 1 No. 1 adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan demi mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.Redaksi sinar grafika (2017).

3. Pengertian Yayasan Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1

Menurut UU No.16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Yayasan, Pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk rnencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

2.1.8 Tujuan Yayasan.

Menurut UU no. 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, Pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan undang-undang (Bastian, 2007:3).

2.1.9 Karakteristik Yayasan

Menurut (Bastian indra, 2011)), karakteristik utama organisasi nirlaba seperti yayasan, dapat dibedakan dengan organisasi bisnis. Perbedaannya terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi seperti yayasan umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Pada Yayasan dimana tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atau jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah dan kepastian aliran masuk kas menjadi ukuran yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

2.1.10 Pendirian dan Pembubaran Yayasan

1. Pendirian Yayasan

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UUY, dimana dalam tata cara mendirikan yayasan tersebut itu terdapat berbagai syarat yang harus dilalui. Pasal tersebut memuat bahwa mendirikan atau membentuk yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan pendiriannya sebagai dana awal. Sedangkan penjelasan atau maksud dari orang berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat 1 UUY adalah rang perseorangan (person) dan badan hukum yang sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 UUY orang yang dimaksud dengan orang asing atau bersama-sama orang asing. Adapun syarat-syarat mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Orang Asing (WNA)
- b. Orang Indonesia (WNI)
- c. Bersama orang Asing
- d. Bersama orang Indonesia

Syarat-Syarat Mendirikan Yayasan – Berikut adalah syarat yang harus terpenuhi ketika akan mendirikan sebuah yayasan.

- 1) Mempunyai susunan pengurus sekurang-kurangnya seorang.
- 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- 3) Tidak bertentangan dengan asusila.
- 4) Tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Yayasan harus memiliki Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, Yayasan harus memiliki tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan

2. Pembubaran Yayasan

Undang-undang yayasan mengatur suatu kemungkinan pembubaran yayasan, baik atas inisiatif organ yayasan sendiri atau sesuai dengan penepatan ataupun putusan pengadilan. Terdapat beberapa hal yang mampu dalam menyebabkan yayasan bubar, yaitu:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah tercapai atau tidak tercapai.
- c. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan alasan tertentu yaitu Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu dalam membayar utangnya setelah dinyatakan vailid, Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan vailid dicabut.

Dalam hal yayasan bubar demi hukum karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, ataupun tujuan yayasan yang telah tercapai ataupun tidak tercapai, maka pembina menunjuk likuidator. Jika yayasan dinyatakan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, terkecuali dalam membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Selama dalam proses likuidasi, maka seluruh surat keluar harus mencantumkan frase dalam likuidasi dibelakang dalam nama yayasan.

Ketika yayasan bubar karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Demikian halnya dengan pembubaran yayasan karena vailid, maka akan berlaku suatu peraturan perundangan-perundangan sesuai dengan benar atau tidaknya diperlukan suatu penunjuk kurator. Tugas likuidator tersebut adalah membereskan harta kekayaan yang telah diubarkan, kemudian memberikan suatu kewenangan sekaligus kewajiban bagi likuditaor dalam melakukan beberapa tindakan dalam proses likuidasi sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir seluruh harta kekayaan yayasan termasuk utang-utang dan juga piutang-piutang yayasan
- 2) Memuat daftar utang-utang yayasan, menyusun peringkat utang tersebut
- 3) Membuat suatu daftar piutang yayasan dan melaksanakan penagihan utang (menjadikan uang)

2.1.11 Permodalan Yayasan

Dalam ketentuan Pasal 26 UU Yayasan diatur mengenai kekayaan Yayasan. Kekayaan yayasan dapat berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan di dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut,kekayaan yayasan dapat diperoleh juga dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik itu dari negara,masyarakat,maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Wakaf di sini berarti wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Adapun, yang dimaksud dengan “perolehan lain”, contohnya deviden,bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau hasil penyertaan yayasan pada suatu badan usaha.

Negara juga dapat memberikan bantuan kepada yayasan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 UU Yayasan. Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 34 UUD 1945.

Namun, menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 (PP Yayasan), ditetapkan kekayaan awal dari yayasan, sebagai berikut :

1. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000.
2. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisah harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 100.000.000.

2.1.12 Perpajakan Yayasan

Pengaturan perpajakan pada yayasan berbeda dengan pengaturan pajak pada badan usaha lainnya. Yayasan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, sumber utama pendapatan dari yayasan berasal dari sumbangan para anggota. Pendapatan lain yang didapat dari yayasan berasal dari usaha yayasan itu sendiri. Pendapatan jenis ini merupakan yang paling luas definisi maupun keberagamannya. Jika yayasan bergerak di bidang kesehatan, pendapatan jenis ini bisa berupa pendapatan dari jasa kesehatan maupun pendapatan lainnya, seperti penyewaan ruang di dalam rumah sakit untuk kantin dan parkir. Bentuk pendapatan lain yayasan adalah hasil investasi. Jika yayasan menginvestasikan asetnya di dalam bentuk deposito, giro, sertifikat Bank Indonesia, reksa dana, properti, atau instrumen investasi lain yang sejenis yang merupakan instrumen investasi modal maka hasil dari investasi ini dapat dianggap sebagai penghasilan dari yayasan.

Dari semua pendapatan yayasan, tidak semua merupakan objek PPh. Petunjuk mengenai PPh bagi yayasan diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tanggal 4 Juli 1995 Mengenai Perlakuan Pajak

Penghasilan bagi Yayasan atau organisasi sejenis (SE Dirjen Pajak No. SE-34/PJ.4/1995). Yang kemudian diperjelas dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ.4/1995 tanggal 19 Juli 1995 mengenai Penyuluhan Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau Organisasi Tertentu (SE Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.4/1995). Kedua surat edaran ini secara jelas menyebutkan bahwa yayasan merupakan objek PPh 25, tetapi yang merupakan objek pajak hanya penghasilan tertentu saja.

2.1.13 Pola Pertanggungjawaban Yayasan

Menurut (Bastian indra, 2011) dalam Yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban Yayasan kepada Pembina. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas, kedua jenis pertanggungjawaban sector public tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

Pertanggungjawaban manajemen (managerial accountability) merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas di Yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang luas (Bastian indra, 2011)

2.1.14 Struktur Organisasi Yayasan

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2001, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang tersebut atau Anggaran Dasar. Kewenangan pembina meliputi (Bastian indra, 2011) :

- 1) Membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta pengawas.
- 3) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- 4) Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- 5) Membuat keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pembina adalah individu pendiri yayasan berdasarkan keputusan rapat anggota, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pengurus adalah organisasi yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan pembuatan hukum. Selain itu, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan (Bastian indra, 2011)

2.1.15 Akuntansi Yayasan

Menurut UU No.16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan

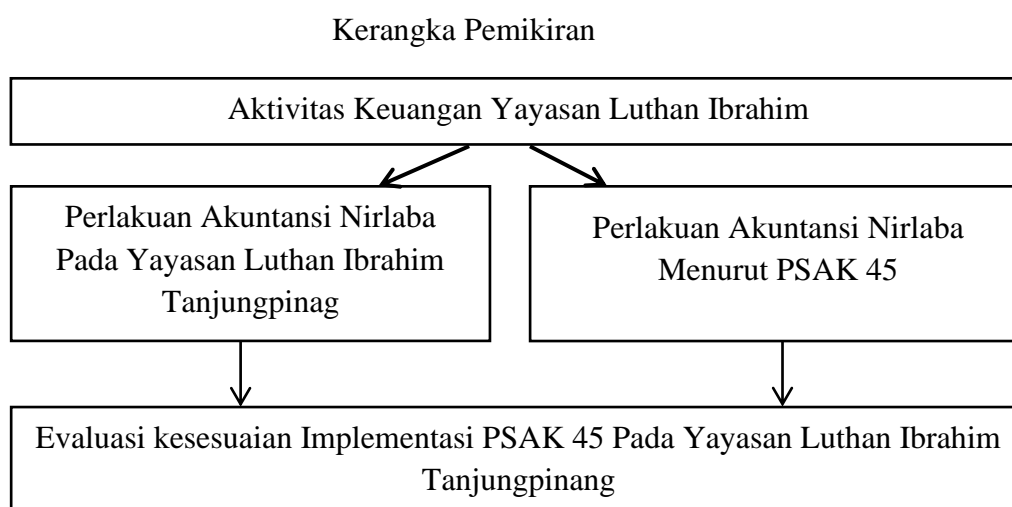
tertentu di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu undang-undang yang mengatur tentang Yayasan telah diperbaharui dengan UU No. 28 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Berikut adalah istilah yang sering digunakan di dalam akuntansi yayasan: (Bastian Indra, 2011)

1. Pembatasan permanen, adalah pembatasan dalam penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya atau penyumbang agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen. Yayasan diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer, adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang, agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang oleh karena itu laporan keuangan Yayasan termasuk organisasi Nirlaba.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terbatas pada perlakuan akuntansi Nirlaba pada YAYASAN LUTHAN IBRAHIM apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 45. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti dibawah ini :

GAMBAR 2.1



Sumber : konsep yang di kembangkan untuk penelitian 2019

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Handayani (2011)

Akuntansi Islam Sebagai Refleksi Akuntansi pada Kegiatan Sosial Di Yayasan Nurul Hayat". Penulis melakukan penelitian ini pada Yayasan Nurul Hayat dan hasilnya menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Hayat sebagai lembaga sosial yang menerapkan prinsip syariah, belum menerapkan akuntansi syariah dalam laporan keuangannya. Pihak akutan yayasan pun juga belum memahami tentang penerapan PSAK 101 maupun

PSAK 109. Disebutkan pula bahwa laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat mengacu pada PSAK 45 mengenai organisasi nirlaba, namun belum menerapkan secara keseluruhan tetapi hanya menerapkan aturannya sedangkan untuk bentuk laporan keuangannya masih bersifat umum digunakan agar mudah dipahami. Akan tetapi, Akuntansi yang diterapkan di Yayasan Nurul Hayat sudah bersifat humanisme. Yayasan Nurul Hayat telah melaporkan laporan keuangannya secara transparan dan mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan maupun yang membacanya, sekalipun itu dari orang awam.

2. Andikawati (2014)

Konstruksi Laporan Keuangan Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109”. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa kedua lembaga di atas belum menerapkan PSAK 45 maupun PSAK 109 dalam bentuk laporan keuangannya, bentuk laporan keuangan lembaga masjid tersebut masih sederhana. Namun setelah dilakukannya rekonstruksi laporan keuangan menunjukkan bahwa PSAK 109 lebih cocok diterapkan dalam laporan keuangan lembaga tersebut meskipun dengan bentuk laporan keuangan yang masih sederhana karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia pada lembaga tersebut yang masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan.

3. Picela (2012)

Penerapan PSAK no.45 dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan nirlaba (non profit) pada yayasan pendidikan SMK Putra KHatulistiwa Pontianak ,hasil penelitiannya adalah penyajian laporan keuangan SMK belum menerapkan PSAK NO.45 tentang pelaporan keuangan entitas Nirlaba,yayasan hanya menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos pos pengklasifikasikan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku’’ (picela, 2012).

4. Chau, Patrick Y. K. & Hu, Paul J (2012)

Penerimaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Oleh Pengelola Yayasan Pendidikan: Analisis Technology Acceptance Model”.Variabel yang berpengaruh kuat dalam mendukung fase penerimaan PSAK 45 oleh pengelola keuangan yayasan pendidikan adalah kompetensi pengguna. Pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pendidikan seseorang merupakan faktor penting pendukung penerimaan PSAK 45 sebagai standar pelaporan keuangan yayasan pendidikan. Diharapkan yayasan pendidikan dapat lebih memperhatikan kompetensi dari pembuat laporan keuangan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan(Chau, Patrick Y. K. & Hu, 2012).

5. Yohanes and jdoko Setyohadi (2017)

Accounting Information System for Nonprofit Organization Based On PSAK 45 Standards Proses penyusunan laporan keuangan nirlaba organisasi tidak dapat dipisahkan dari proses mengungkapkan perbedaan dalam sistem adalah informasi mengumpulkan bukti transaksi seperti buku

bank, kegiatan proses pembuktian dalam sistem (cara kerja dilakukan pembayaran, tanda terima (tanda terima tanda terima dan tanda terima tanda terima) keluar) dan teknologi yang digunakan dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut selanjutnya dicatat dalam uang tunai kemudian di jurnal dan dicatat dalam buku besar, diposting ke neraca saldo, kemudian dibuat menjadi laporan keuangan. Setyohadi (2017) & Nonprofit, (2017).

6. Claudia W. M. Korompis (2013)

Evaluation of the implementation of financial statements as a form of accountability of saint Stanislaus Girisonta Catholic Church Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menggambarkan bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan gereja, dan persepsi penulis dan pengguna mengenai akuntabilitas keuangan dalam bentuk penyajian laporan keuangan Gereja Paroki Katolik St. Stanislaus Girisonta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Paroki Gereja Katolik St. Stanislaus Girisonta selaras dengan revisi PSAK 45, 2011. Akuntabilitas laporan keuangan Gereja Katolik St. Stanislaus Parish Girisonta sudah baik, dan tanggung jawab manajemen keuangan mereka sesuai dengan prosedur. Namun, itu tidak didistribusikan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa orang terus mempertanyakan pengelolaan laporan keuangan Paroki Gereja Katolik St. Stanislaus Girisonta

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moleong (2012).

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari Yayasan Luthan Ibrahim dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung, baik berupa keterangan keterangan ataupun literature yang mempunyai hubungan dalam penelitian yang berifat melengkapi dan mendukung data primer. Data-data sekunder yang diambil penulis yaitu :

- a. Laporan keuangan yayasan
- b. Profil Yayasan Luthan Ibrahim
- c. Daftar perpustakaan (buku-buku referensi)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara mendalam, observasi, dan penelitian perpustakaan.

3.3.1 Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen Yayasan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih dipercaya kalau didukung oleh sejarah, kegiatan di masyarakat, dan autobiografi.

3.3.2 Studi Pustaka

Penelitian perpustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan cara menggunakan informasi dan *literature*, menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti referensi buku-buku dari pustaka yang diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa dan kualitatif adalah proses

pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data (Moleong, 2009).

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data laporan keuangan.
2. Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi nirlaba dengan PSAK 45
3. Penarikan kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

- Anantawikrama Tungga Atmadja, S. ,M. (2014). Analisi penerapan pencatatan keuangan berbasis ETAP pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*)
- Andikawati. (2014). “Konstruksi Laporan Keuangan Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109”. *Akuntansi*.
- Bastian indra. (2011). *akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Chau, Patrick Y. K. (2012). “Penerimaan pernyataan standar akuntansi keuangan oleh pengelola keuangan yayasan pendidikan : Analisis Technology acceptance model.” *Akuntansi*.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hans kartahadi dkk. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi indonesia. (2018). *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kasmir. (2014). Laporan Keuangan Bank. In *Manajemen Perbankan*.
- M.Syam, A. halim & Kusufi. (2013). *Akuntanhsi sektor Publik*. Jakarta: Salemba.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: ANDI.

Nickels & mchugh. (2010). *Pengantar Bisnis 2*. Semarang: Salemba Empat.

picela. (2012). "Penerapan PSAK no.45 dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan nirlaba (non profit) pada yayasan pendidikan SMK Putra KHatulistiwa Pontianak. *Akuntansi*.

redaksi sinar grafika. (2005). *undang Undang Yayasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setyohadi(2017), 5. Yohanes and jdoko, & Nonprofit. (2017). "Accounting Information System for Nonprofit Organization Based On PSAK 45 Standards. *Akuntansi*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Wantah, M. J. (2015). Analisis Penerapan Psak No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Dwi Annisya Rakhmadani
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 14 Januari 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : jalan Ganet Prumahan Bintang Permai Blok D1 no 2
Tanjungpinang Timur
Provinsi Kepulauan Riau
No Hp : 082387513800
Email : dwi.annisa1410@gmail.com
Nama Orang tua : Khairul S.Pd.SD dan Heppi Hayati
Riwayat Pendidikan Formal : SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur
SMP Negeri 7 Tanjungpinang Timur
SMA Negeri 2 Tanjungpinang Timur
STIE Pembangunan Tanjungpinang

Tanjungpinang, 11 Januari 2021

DWI ANNISYA RAKHMADANI